

DAFTAR BACAAN

1. Buku

- Ali, Chidir, Badan Hukum, PT. Alumni, Bandung, 1999.
- Asyadie, Jaeni, Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Erlangga, Jakarta, 2007.
- Azizah, Hukum Perseroan Terbatas, Intimedia, Malang, 2015.
- Fuady, Munir, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta, 2013.
- Gatot, Supramono, BUMN ditinjau dari segi hokum perdata, Jakarta, Rineka Cipta, 2016.
- Hartini, Rahayu, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2007.
- Indradewa, Jusuf L, Pengertian Keuangan Negara Menurut Pasal 23 ayat (5) UUD 1945, dalam buku Kapita Selektta Keuangan Negara, Jakarta, 1996.
- Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mahmud, Peter Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2010.
- Maryam, Kamus Hukum, Reality Publisher, Jakarta.
- Mulhadi, Hukum Perusahaan Bentuk Badan Usaha diindonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Nurdin, Andriani, Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian hukum, PT. Alumni, Bandung, 2012.
- Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1985.
- Rido, R. Ali, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan. Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung, 2001.
- Silondae, Arus Akbar, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2003.
- Situmorang, Victor M, Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Subhan, Hadi, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan praktik diperadilan, Kencana, Jakarta, 2014.
- Sutedi, Adrian, Hukum Keuangan Negara, Sinar grafika, Jakarta, 2010.
- Syahdeni, Sutan Remi, Hukum Kepailitan, Grafiti, Jakarta, 2010.
- Usman, Rachmadi, Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2004.
- Widijowati, Dijan, Hukum dagang, Andi, Yogyakarta, 2012.
- Yani, Ahmad, Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

2. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor No.075 K /Pdt.Sus/2007 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pailit/2007PN.Niaga/Jkt.Pst;
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XI/2013.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

2. Internet

<https://kuwatslametgemiadi.wordpress.com/2012/08/07/ruang-lingkup-perbendaharaan-negara/>, diakses tanggal 08/11/2017 pukul 09.35.

<http://nugraha-corporation.blogspot.com/2011/10/keuangan-negara-dan-perbendaharaan.html>, 08/11/2017 10.35.